

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian, membentuk *value* (keadilan dan pemerataan pembangunan) serta tetap memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya bagi generasi berikutnya. Persoalan utama yang dihadapi oleh setiap negara yang sedang membangun termasuk Indonesia, dalam mencapai kesejahteraan rakyat ialah pengangguran, pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah besar dalam kehidupan yang selalu menjadi bahasan serius yang terkait dengan kemaknuran masyarakat meskipun akhir-akhir ini perlahan memperlihatkan angka resmi menurun. Kemiskinan memiliki arti keadaan yang tidak memungkinkan demi terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, air minum, pakaian dan tempat berlindung yang disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan hidup dan susahny jalan kepada kesehatan, pendidikan maupun pekerjaan terasa sulit untuk ditempuh bagi rakyat miskin.

Al-Ghazali mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri baik dari segi kebutuhan material maupun kebutuhan rohani. Argumen tersebut dapat juga dibuat oleh Ahmed, kemiskinan bukan hanya merupakan perampasan barang dan jasa, tetapi juga kurangnya kemiskinan dalam roh (Huda, 2015).

Kemiskinan dapat mencakup ketidakmampuan individu, kelompok, dan situasi kolektif masyarakat. Kemiskinan massal dan kasus yang parah biasanya ditemukan di negara berkembang, tetapi terdapat bukti bahwa kemiskinan juga ada di negara maju. Di negara berkembang, kemiskinan terkait erat dengan aspek struktural. Misalnya karena sistem ekonomi tidak adil, kurangnya lapangan pekerjaan, praktek KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), diskriminasi sosial, kurangnya jaminan sosial, dan banyak hal lainnya.

Tabel 1.1.

Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2008-2021

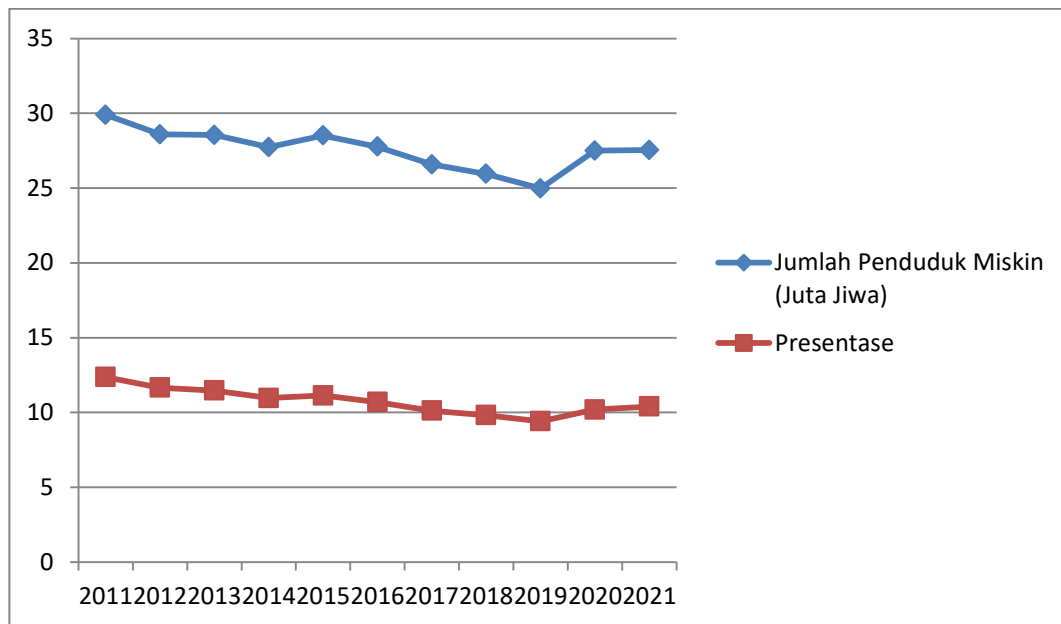
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
2011	29,89	12,36%
2012	28,59	11,66%
2013	28,55	11,47%
2014	27,73	10,96%
2015	28,51	11,13%
2016	27,76	10,7%
2017	26,58	10,12%
2018	25,95	9,82%
2019	24,97	9,41%
2020	27,5	10,19%
2021	27,54	10,4%

Sumber: BPS Indonesia (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1. menunjukkan berapa banyak jumlah penduduk miskin yang terdapat di Indonesia dalam bentuk jumlah (juta jiwa) dan persentasenya. Dalam kurun waktu 11 tahun (2011-2021), Indonesia mengalami beberapa penurunan jumlah

kemiskinan yang terdapat pada tahun 2011-2014 dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2015.

Pada tahun 2015-2019, Indonesia mengalami penurunan lagi dengan cukup konsisten. Akan tetapi pada tahun 2020 dan 2021 kembali mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.



Gambar 1.1.

Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2011-2021

Gambar 1.1. dan Tabel 1.1. merupakan penggabungan jumlah data orang miskin dari berbagai daerah, termasuk Jawa Barat. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di pulau jawa yang memiliki angka kemiskinan terbanyak. Hal ini disebabkan salah satunya oleh kurangnya lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran dan kemiskinan ikut meningkat.

Kemiskinan dan pengangguran di Jawa Barat tahun 2011-2021 masih membutuhkan perhatian ekstra dari pemerintah. Meski pertumbuhan ekonomi beberapa kali mengalami peningkatan, namun kenyataannya jumlah pengangguran dan warga miskin masih tergolong tinggi.

Tabel 1.2.

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2021

Provinsi Di Pulau Jawa	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)		
	2019	2020	2021
DKI Jakarta	362,30	496,84	498,29
Jawa Barat	3375,89	4188,52	4004,86
Jawa Tengah	3679,40	4119,93	3934,01
D.I. Yogyakarta	440,89	503,14	474,49
Jawa Timur	4056,00	4585,97	4259,60
Banten	641,42	857,64	852,28

Sumber: BPS Indonesia (2022)

Tabel 1.2. memperlihatkan bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Barat merupakan salah satu angka tertinggi daripada provinsi lain yang ada di pulau Jawa dan penulis merupakan salah satu yang ada dalam masalah di lokasi penelitian tersebut. Hal ini yang membuat penulis menjadikan Jawa Barat sebagai lokasi penelitian. Kemiskinan merupakan masalah serius yang harus segera di atasi oleh pemerintah Jawa Barat. Jika tidak diatasi lebih lanjut, maka kesejahteraan masyarakat akan terganggu.

Oleh karena itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan bahwa Pemprov Jabar sudah memiliki tiga solusi untuk mengatasi kemiskinan. Solusi pertama adalah menurunkan beban pendapatan masyarakat, seperti kesehatan gratis

dan sekolah gratis. Solusi kedua adalah menekan angka kemiskinan dengan rumah tidak layak huni (rutilahu). Solusi ketiga adalah meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan usaha (Raharjo, 2023).

Untuk mengurangi angka kemiskinan pemerintah juga harus mengurangi angka pengangguran. Ketidak mampuan seseorang memenuhi kebutuhan pokok tersebut dapat disebabkan oleh pengangguran, yang selalu disebut sebagai penyebab utama kemiskinan.

Tabel 1.3.

15 Wilayah dengan Angka Kemiskinan Tertinggi di Jawa Barat

Wilayah Jawa Barat	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)		
	2019	2020	2021
Kabupaten Bogor	395	465,7	491,2
Kabupaten Garut	235,2	262,8	281,4
Kabupaten Cirebon	217,6	247,9	271
Kabupaten Bandung	223,2	263,6	269,2
Kabupaten Cianjur	207,1	234,5	260
Kota Bandung	84,7	100	112,5
Kota Tasikmalaya	77	86,1	89,5
Kota Bekasi	113,7	134	144,1
Kabupaten Bekasi	149,4	186,3	202,7
Kabupaten Karawang	173,7	195,4	210,8
Kabupaten Sukabumi	153,3	175,1	194,4
Bandung Barat	159	179,5	190,8
Kabupaten Indramayu	191,9	220,3	228,6
Kota Depok	49,4	60,4	63,9

Kota Bogor	64	75	80,1
------------	----	----	------

Sumber: BPS Jawa Barat (2022)

Pengangguran dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran merupakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Pengangguran terjadi karena pertumbuhan angkatan tenaga kerja lebih tinggi dari pertumbuhan lapangan pekerjaan yang ada. Dalam sudut pandang makro ekonomi, pengangguran yang tinggi merupakan masalah bagi suatu perekonomian daerah atau negara. Pengangguran ini tidak terbatas pada orang yang belum bekerja, tetapi dapat termasuk pula pada orang-orang yang sedang mencari pekerjaan serta orang yang memiliki pekerjaan namun tidak produktif, sehingga dapat dikategorikan sebagai pengangguran.

Menurut Sukirno (1998) pengangguran adalah keadaan dimana terdapat individu yang ingin bekerja akan tetapi belum terwujudkan. Ketika seseorang menjadi pengangguran, maka mereka tidak mendapatkan pemasukkan dana yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga tidak menutup kemungkinan akan melakukan segala cara agar dapat kebutuhannya terpenuhi.

Pengangguran ini telah menjadi masalah perekonomian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Karena adanya pengangguran, maka tingkat produktivitas serta pendapatan masyarakat berkurang. Sehingga terjadilah kemiskinan serta masalah-masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih luas supaya mengurangi tingkat pengangguran. Bukan

semata-mata tugas pemerintah pusat, pemerintah daerah pun harus membantu kegiatan tersebut, salah satunya Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Tingkat pengangguran di Jawa Barat masih terhitung cukup tinggi. Pada tahun 2021, terhitung tingkat pengangguran di Jawa Barat sebanyak 9,82 persen. Selain pemerintahannya yang harus memberikan lapangan pekerjaan, masyarakatnya pun harus berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 39 dan surat At-Taubah ayat 105 yang artinya:

“Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakannya.” (QS. an-Najm: 39).

“Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah: 105)

Pada akhirnya Allah akan melihat usaha kita dalam menjemput rezeki dan membalasnya secara setimpal. Oleh sebab itu, rezeki yang tumpah ruah dan berkah hanya didapatkan dari usaha yang maksimal serta niat yang tulus. Maka dari itu, kita selaku manusia harus selalu berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan sehingga dengan hal tersebut tingkat kemiskinan dan pengangguran lambat laun akan semakin berkurang dan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor penting untuk lepas dari lingkaran kemiskinan, karena pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran adanya perkembangan aktivitas pembangunan untuk mencapai tingkat kemakmuran. Dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat perlu dilakukan pembangunan yaitu melalui peningkatan perekonomian sebagai hal untuk mengatasi masalah-masalah dari

pembangunan dan sosial kemasyarakatan, contoh orang yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) yang akan berdampak pada kemiskinan.

Selanjutnya pertumbuhan ekonomi yang menjadi unsur penting dalam melihat peningkatan pembangunan, dilihat dari penggunaan sumber daya yang digunakan sehingga tercipta pekerjaan yang dapat menampung orang yang belum bekerja tersebut. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada peningkatan hasil dari produksi barang/jasa. Oleh karena itu banyaknya tenaga kerja akan meningkatkan produksi barang atau jasa sehingga pengangguran dan kemiskinan akan menurun. Selain itu jika pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak kepada pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara atau daerah tersebut demi mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, otomatis penerimaan pemerintah juga meningkat sehingga pengeluaran pemerintah pun ikut naik.

Dalam teori ekonomi pembangunan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah *government expenditure* mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Pemerintah diharapkan lebih meningkatkan dana pengeluaran untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang ada. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ginting dan Rasbin (2019) dengan variabel yang digunakan adalah kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, mendapatkan hasil bahwa faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia berdasarkan hasil estimasi adalah tingkat pertumbuhan ekonomi (GDP), sementara itu tingkat pengangguran (UNE)

tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Hasil estimasi regresi maka didapatkan hasil bahwa sebelum dan sesudah krisis menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian lain dilakukan oleh Alvianoa, dkk (2020) dengan variabel dependennya kemiskinan dan variabel independennya pengeluaran pemerintah, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dapat diambil kesimpulan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan tidak relevan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Diharapkan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan lebih meningkatkan anggaran pengeluaran/belanjanya, khususnya pengeluaran/belanja untuk pengentasan masalah kemiskinan dan mengutamakan pembangunan dari segi infrastruktur secara lebih merata. Tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif dan relevan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan, dengan begitu tingkat pengangguran terus dikurangi. Dengan terus melaksanakan upaya penurunan angka pengangguran nantinya akan berdampak pada penurunan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut menjadi penyebab tidak meratanya hasil pembangunan, maka dapat diharapkan pemerintah berfokus pada semua bidang yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melihat pemerataannya juga yang berfokus pada kebijaksanaan sektor riil.

Dalam upaya untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Barat, maka diperlukannya data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2011-2021 sehingga penulis meneliti: “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Barat Tahun 2011-2021.”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat disusun pertanyaan-pertanyaan berikut terkait penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada tahun 2011-2021?
2. Apakah pengeluaran pemerintah mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada tahun 2011-2021?
3. Apakah tingkat pengangguran mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada tahun 2011-2021?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditarik tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat tahun 2011-2021.

2. Menganalisis seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat tahun 2011-2021.
3. Menganalisis seberapa besar pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat tahun 2011-2021.

D. Manfaat Penelitian

Kemudian manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki manfaat untuk informasi mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan terutama pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan pengangguran tahun 2011-2021.
2. Memiliki manfaat sebagai tambahan pengetahuan kepada pembaca.
3. Memiliki manfaat untuk menjadi contoh atau masukan bagi peneliti yang variabelnya mirip ataupun sama yaitu pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, pengangguran dan kemiskinan.